

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Agam

Misrawati¹, Asep Ajidin²

^{1,2} Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Abstrak

This research examines the level of community participation in village development planning in Nagari Koto Baru, Baso District, Agam Regency. The study explores various factors that influence community participation and identifies both supportive and inhibiting factors. Data was collected through surveys and interviews with respondents representing diverse age groups, genders, education levels, occupations, and lengths of residence in the village. The findings indicate that community participation in village development planning is diverse, with active involvement observed in attending planning meetings, contributing ideas and opinions, and actively participating in the implementation and utilization of development outcomes. Factors such as awareness, access to information, open forums, trust in the government, easy access to meeting places, and adequate budget allocation support community participation. However, challenges such as lack of awareness, limited access to information, absence of open forums, and mistrust in the government hinder community participation. The study offers recommendations for the local government to promote and enhance community participation, including addressing the inhibiting factors. Furthermore, the community is encouraged to increase their awareness and engagement in the development planning process, utilizing the provided information by the government.

Keywords: Tingkat, Partisipasi, Perencanaan Pembangunan Desa, Kabupaten Agam

Copyright (c) 2023 Misrawati

✉ Corresponding author :

Email Address : misrayendra@gmail.com

PENDAHULUAN

Gagasan desentralisasi harus dipraktikkan dalam pembangunan dengan bekerja dari bawah (bottom up), mengikut sertakan masyarakat secara aktif (participatory), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (from and with people), dalam jurnal (Fadil, 2013). Harapan yang besar dari pemerintah daerah selama masa Orde Baru adalah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan keinginannya sendiri dari tahun ke tahun tidak pernah menjadi kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakmampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan keseragaman yang selama ini dikembangkan pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah dalam melakukan pembangunan.

Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah membangun harmonisasi antara

berbagai aspek perencanaan yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan partisipatif. Akhir dari upaya tersebut adalah terakomodirnya (terjadi proses penyesuaian) aspirasi dan kebutuhan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Realita yang ada menunjukkan bahwa aspek perencanaan teknokratis (menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya pada Negara industri oleh kelompok teknis) dan perencanaan politis masih mendominasi alokasi anggaran pembangunan Daerah. Di sisi lain, hasil-hasil perencanaan partisipatif yang mencerminkan keinginan masyarakat masih kurang mendapatkan posisi dalam pembagian alokasi anggaran pembangunan. Ketimpangan tersebut tidak hanya memunculkan persoalan manajerial perencanaan saja, tetapi lebih jauh dari itu, telah muncul anggapan bahwa pengalokasian anggaran pembangunan Daerah kurang mampu menampung kepentingan dan keinginan masyarakat. Permasalahan yang mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai aspek perencanaan tersebut adalah rendahnya mutu proses dan mutu hasil Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Disamping itu, hasil-hasil penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa belum mampu menempatkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama.

Pembangunan desa sangat penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988) dalam artikel (Herman, 2019). Mengingat pemerintahan Nagari merupakan suatu organisasi, maka organisasi itu haruslah sederhana dan efektif serta memperhatikan dan mengingat masyarakat setempat, oleh sebab itu pemerintahan Desa/Nagari harus memiliki struktur pemerintahan yang didalamnya terdapat pula lembaga-lembaga kemasyarakatan serta program-program perencanaan pembangunan disegala aspek demi kemajuan Nagari, hal ini sangat bergantung pada partisipasi dan motivasi masyarakat itu sendiri.

Untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan adalah adanya masyarakat didalamnya, baik itu kemampuan juga kemauan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses (Arif, 2006). Dalam pembangunan masyarakat diharapkan dapat ikut aktif berperan serta mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan kita perlu mengetahui dan paham bagaimana melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas, karena dengan melibatkan masyarakat lokal akan sangat efektif, ini disebabkan dalam pelaksanaannya masyarakat lokal lebih mengetahui masalah serta kendala yang dihadapi di Daerahnya.

Pada masa orde baru (1966-1998), system pembangunan yang ada di Indonesia menggunakan system perencanaan yang bersifat sentalistik (terpusat), pemerintah yang menentukan program-program pembangunan baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa. Dari perencanaan yang bersifat sentralistik inilah akhirnya menimbulkan masalah didalam masyarakat karena tidak disertakannya partisipasi dari masyarakat setempat, menurut dalam penelitian (Abbas, 2013)

Medgley *et.al* (1986) dalam jurnal (Abbas, 2013) menyatakan partisipasi bukan hanya salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Lebih lanjut Menurut Midgley, gagasan partisipasi

rakyat dan peran serta masyarakat yang saling terkait. Yang pertama berkaitan dengan isu-isu yang luas dari pembangunan sosial dan penciptaan peluang bagi keterlibatan orang dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial suatu bangsa, "berkonotasi yang terakhir keterlibatan langsung orang-orang biasa dalam urusan lokal. Partisipasi masyarakat dijelaskan dalam Satu dokumen PBB (1981) mendefinisikan sebagai: Penciptaan kesempatan untuk memungkinkan semua anggota komunitas untuk secara aktif berpartisipasi dan mempengaruhi proses pembangunan dan untuk berbagi secara adil dalam hasil pembangunan. Dilihat dari model pembangunan yang kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat, padahal yang paling utama ialah memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat memegang andil dalam pembangunan secara langsung.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab, diwujudkan melalui proses musyawarah, dimana rancangan dari rencana akan dibahas dalam musyawarah dan dikembangkan bersama oleh semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan ini berasal dari masyarakat dalam segala strata sosial. FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak asasi manusia, sehingga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan hidup masyarakat sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan masyarakat sendiri yang merasakan dan menilai apakah pembangunan itu berhasil atau tidak. Selama ini pada umumnya dapat dilihat partisipasi masyarakat desa tergolong lemah, baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun mengatur aktivitasnya sendiri.

Untuk di Nagari Koto Baru dapat kita lihat tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa selama tahun 2022 yang diambil dari dokumen daftar hadir rapat Perencanaan Pembangunan di nagari yaitu :

Tabel 1. Data kehadiran dalam rapat perencanaan Pembangunan di nagari Koto Baru

No	Jenis kegiatan	Jumlah undangan	Jumlah yang hadir	Presentase
1	Musna Penyusunan RKP Nagari tahun 2023	100 Orang	67 orang	67 %
2	Musrenbang Nagari tahun 2022 untuk kegiatan tahun 2023	110 Orang	68 Orang	61 %
3	Musyawah Jorong Tigo Surau dalam penyusunan RPJM Nagari 2022-2027	90 orang	48 Orang	53 %
4	Musyawah Jorong Kampuang IV dalam penyusunan RPJM Nagari 2022-2027	90 orang	55 Orang	61 %
5	Musyawah Jorong Kasiak Jalan Kapakan dalam penyusunan RPJM Nagari 2022 - 2027	90 orang	50 Org	55 %

Dilihat dari data diatas, dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Nagari Koto Baru, masih terlihat sedang,

dimana dari data diatas dapat di rata-ratakan kehadiran masyarakat tersebut dalam musyawarah perencanaan pembangunan sebesar 59,4 % (Sedang).

Jika dilihat dari proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dan Musrenbangkec (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan) lalu ketingkat koordinasi ditingkat Kabupaten hingga Provinsi dengan pola berjenjang ini dari bawah ke atas tidak banyak menjanjikan aspirasi murni dari warga Desa. Karena penduduk Desa hanya berpartisipasi dalam proses perencanaan hingga tingkat Kecamatan, mekanisme yang digunakan oleh Musrenbangdes hanya berfungsi untuk memajukan kebutuhan penduduk. Akibatnya, penduduk tidak memiliki pengetahuan tentang kapan atau bagaimana konstruksi akan dilanjutkan di masa depan, dan akibatnya, akan ada konstruksi yang jelas tidak aspiratif. Jadi Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang sangatlah penting, tetapi faktanya partisipasi masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan masih sangatlah lemah, mulai dari aspek semangat, kesadaran maupun kemampuan individu. Lemahnya semangat, kesadaran dipengaruhi oleh berbagai masalah, salah satunya keterbatasan yang dimiliki masyarakat, disamping itu lemahnya aspek kepemimpinan dalam suatu daerah dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Dalam Perencanaan Pembangunan Desa adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa serta mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Beberapa fenomena yang terjadi adalah: 1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, atau kurangnya dukungan dari pemerintah desa. 2) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, atau kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berbeda-beda di setiap desa. 3) Kurangnya evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Evaluasi yang kurang terhadap partisipasi masyarakat dapat menghambat proses perbaikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. 4) Tantangan dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah metode pengukuran partisipasi masyarakat dapat berbeda-beda dan terkadang sulit untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara akurat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Partisipasi masyarakat yang baik dapat membantu memperoleh masukan dan saran yang mendukung keberhasilan program pembangunan desa serta memberikan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap program pembangunan desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara akurat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga pembangunan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa di Nagari Koto Baru, Kabupaten Agam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan sumber data sekunder. Informan utama meliputi Walinagari, perangkat nagari, dan badan permusyawaratan, sedangkan informan biasa melibatkan beberapa anggota masyarakat dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Melalui wawancara dengan berbagai pihak seperti Walinagari, Sekretaris Nagari, Ketua BAMUS, dan lainnya, terlihat kesamaan pandangan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, masyarakat Nagari Koto Baru terlibat dalam musyawarah tingkat Jorong, Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten. Mayoritas masyarakat mengikuti rapat perencanaan dengan antusias, memberikan masukan, mengusulkan program pembangunan, dan menjadi anggota tim pelaksana. Namun, ada juga yang hadir tetapi hanya mendengarkan tanpa memberikan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai bentuk seperti memberikan tenaga sukarela, bantuan dana, material, pikiran, dan keahlian. Beberapa warga seperti kepala tukang turut menyumbangkan keahliannya dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemanfaatan hasil pembangunan, mayoritas masyarakat Nagari Koto Baru berpartisipasi dengan memelihara hasil pembangunan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Masyarakat sangat memanfaatkan dan membutuhkan sarana yang telah dibangun, dan partisipasi ini membantu menciptakan kelancaran pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan/evaluasi pembangunan masih kecil karena sering dilakukan oleh pihak yang ditunjuk atau tim berwewenang. Meskipun begitu, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi tetap ada di Nagari Koto Baru. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan pengawasan/evaluasi pembangunan di Nagari Koto Baru menunjukkan tingkat yang positif, namun masih ada ruang untuk peningkatan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Nagari Koto Baru Kecamatan Baso .

Pembangunan Nagari Koto Baru merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini, peran serta masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan pembangunan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Nagari Koto Baru, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lamanya tinggal di Nagari Koto Baru. Berdasarkan penelitian, masyarakat yang berumur menengah ke atas cenderung lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan karena kematangan pemikiran mereka. Jenis kelamin tidak menjadi hambatan, karena partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Tingkat

pendidikan juga berperan, karena masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih aktif berpartisipasi. Pekerjaan dan penghasilan juga memengaruhi, karena masyarakat yang bekerja di sektor yang terkait dengan pembangunan desa cenderung lebih terlibat. Lamanya tinggal di Nagari Koto Baru juga berpengaruh, karena masyarakat yang tinggal lebih lama cenderung lebih aktif berpartisipasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi komunikasi, iklim sosial, ekonomi, politik, budaya, kesempatan berpartisipasi, dan kebebasan berkreasi. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi. Iklim sosial yang kondusif, situasi ekonomi yang memadai, stabilitas politik, dan budaya yang mendukung juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selain itu, kesempatan berpartisipasi yang terbuka dan inklusif serta kebebasan berprakarsa dan berkreasi memungkinkan masyarakat berkontribusi secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Dalam mengatasi faktor-faktor tersebut, pemerintah Nagari Koto Baru perlu memastikan adanya akses informasi yang cukup dan ruang partisipasi yang terbuka bagi masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi perlu diupayakan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat meningkat dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Faktor pendukung dan penghambat partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Desa

Faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Nagari Koto Baru meliputi beberapa hal. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sangat penting dalam mendukung partisipasi aktif. Masyarakat yang menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan desa akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam proses perencanaan. Selanjutnya, adanya informasi yang cukup dari pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung. Jika masyarakat memiliki akses yang mudah dan transparan terhadap informasi terkait rencana pembangunan, kebijakan, dan anggaran, mereka dapat lebih memahami isu-isu yang ada dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perencanaan. Forum partisipasi masyarakat yang terbuka juga mendukung partisipasi aktif. Melalui forum dialog, masyarakat dapat berbagi pandangan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi, sehingga perencanaan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga menjadi faktor penting. Kepercayaan ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam berpartisipasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Terakhir, akses yang mudah ke tempat musyawarah pembangunan desa dan alokasi anggaran yang cukup untuk partisipasi masyarakat juga mendukung partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan.

Namun, beberapa faktor penghambat juga perlu diperhatikan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, keterbatasan akses informasi dari pemerintah desa, tidak adanya forum partisipasi yang terbuka, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah bisa menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu berupaya mengatasi hambatan-hambatan ini agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak positif pada pembangunan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Koto Baru, Kecamatan Baso, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa beragam. Masyarakat berpartisipasi dalam menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan dengan tingkat partisipasi yang baik dan tinggi, yaitu 72% masyarakat berpartisipasi secara aktif dengan menghadiri rapat, sedangkan 8% tidak hadir. Dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan, partisipasi masyarakat juga bervariasi. Sebanyak 32% memberikan masukan atau pendapat, 36% berpartisipasi dalam memilih program pembangunan, dan 5% menjadi anggota tim pelaksana. Namun, ada juga sekitar 12%

masyarakat yang lebih pasif dan hanya menghadiri rapat tanpa memberikan pendapat. Masyarakat Nagari Koto Baru juga berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Sekitar 60% memberikan tenaga sukarela, dan 68% memberikan bantuan berupa pikiran. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam pemanfaatan hasil pembangunan dengan tingkat partisipasi mencapai 88%. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Nagari Koto Baru antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lama tinggal di nagari. Masyarakat yang memiliki kesadaran, mendapatkan informasi yang cukup, memiliki forum partisipasi, kepercayaan terhadap pemerintah, dan akses yang mudah ke tempat musyawarah cenderung lebih berpartisipasi. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat, seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan akses informasi, tidak adanya forum partisipasi yang terbuka, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Sebagai saran, pemerintah Nagari Koto Baru perlu terus mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi juga perlu diperhatikan dan diatasi. Selain itu, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan serta memanfaatkan akses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa.

Referensi

- Abbas, I. (2013). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes (Study Kasus Gopang Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*. Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Adam Latif, Irwan, A. M. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan*. 144-164.
- Afifah, F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Kasus: Implementasi Program Audit Sosial Di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Skripsi*, 13.
- Amulia, R. A. (N.D.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Desa*.
- Andi Sayumitra. (2009). *Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Lapang Kecamatan Juhan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Sumatera Utara.
- Arc Wazir Ws, Et Al. (1999). *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekretaris Bina Desa Dengan Dukungan Ausaid Melalui Hiv/ Aids And Std Prevention Dan Care Project*.
- Arif. (2006). *Reformasi Birokrasi Dan Demokratisasi Kebijakan*.
- Fadil, Fathurrahman. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 11(8), 287-294. [Http://Ppjp.Unlam.Ac.Id/Journal/Index.Php/Jippl/Article/View/897](http://Ppjp.Unlam.Ac.Id/Journal/Index.Php/Jippl/Article/View/897)
- Hamdan Maosul, Erlan Suwarnan, A. B. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2021*. 3668-3677.
- Herman, H. (2019). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. ... Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. <https://Stiemmamuju.E-Journal.Id/Gjiej/Article/View/9>
- Korwa, J. C., Ruru, J. M., & Palar, N. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Program Anggaran Dana Desa Di Desa Duai Distrik Bruyadori Kabupaten Biak Numfor*. *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 7(2), 107-115.
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan*. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan*

- Publik*), December, 144–164. <https://doi.org/10.31947/Jakpp.V1i2.7977>
- Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial* <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/1200>
- Mikkelsen. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya- Upaya Pemberdayaan*. 64.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rizal Pahlevianur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Ns Debby Sintania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Muhardhani, Amruddin, Mochammad Doddy Syahirul Alam, Mutia Lisy, D. B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Normina. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. 14(26), 71–85.
- Rizal, M., Saputra, Dani Nur, & Lis Hafrida. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sugiyono. (2009). *No Titleetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta Cv.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>
- Usmaniya, D. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari In *Jurnal Umrah*. [Internet]. [Diunduh Tanggal 3 http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/Gravity_Forms/1-Ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/06/Jurnal1.Pdf